



Hubungan Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.

Teguh Erawati^{1*}, Ester Kewa Kelep².

¹Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Indonesia

*Email: eradimensiarch@gmail.com¹, esterkewa53@gmail.com²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1119>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2023-03-10

Diperbaiki :
2023-03-14

Disetujui :
2023-03-18

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni agar memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) pada Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lembata. Populasi dimana dipakai dalam penelitian ini yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Sampel dimana dipakai yakni laporan realisasi anggaran tahun 2012-2021. Metode pengumpulan data memakai penelitian kuantitatif mengambil data sekunder pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. Hasil penelitian menyatakan jika variabel Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan Kabupaten Lembata, kemudian variabel pertumbuhan ekonomi serta ukuran pemerintah daerah tidak mempunyai dampak kinerja keuangan Kabupaten Lembata.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah, Kinerja Keuangan Daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the impact of Regional Income (PAD), Economic Growth (PE), Public Allocation Fund (DAU), as well as the size of the regional government (UPD) on regional financial performance in the Lembata district. One population that is used in this research is the financial report from the Lembata District Government. The sample used is the budget implementation report for 2012-2021. The data collection method uses quantitative research to take secondary data on the District Financial Agency of Lembata. The results of the research stated that if the variable Regional Income and the General Allocation Fund has a positive impact on the financial performance of the Lembata District, then the economic growth variable as well as the size of the local government does not have an impact on its financial performance.

Keywords: Local Income, Economic Growth, General Allowance Funds, Size Of Government, Financial Performance Of The Region.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yakni wewenang, hak, serta wajib suatu daerah dalam menguasai serta mengurus sendiri kepentingan penduduk serta urusan pemerintahan lingkungan NKRI, melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah kini memiliki kemampuan lebih untuk menangani semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemantauan, dan penilaian. Untuk memahami besarnya upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya, maka pemerintah daerah harus memanfaatkan segala potensi yang ada di daerahnya untuk pembangunan dan pengembangan wilayahnya dan mengelola keuangan daerahnya (B. I. Sari & Wati, 2021).

Pemerintah pusat mengembangkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan agar pemerintah daerah lebih otonom pada mengelola keuangan daerahnya hingga pembangunan daerah bisa terselesaikan secara cepat tanpa perlu menunggu pendanaan dari pusat. Sehingga, penting mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Antari & Sedana, 2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah yakni indikator yang baik tingkat pencapaian hasil kerja padabagian keuangan daerah, yang misalnya pendapatan serta belanja daerah yang memanfaatkan sistem keuangan dari ketentuan ataupun kebijakan peraturan UU dengan masa periode tertentu. Diantisipasi untuk memberikan kinerja terbaik hingga saat ini dengan rencana anggaran yang telah dirancang dan disetujui (Putri & Darmayanti, 2019).

Darma (2019), menegaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat oleh pemerintah daerah yakni fenomena dimana ditimbulkan oleh penerapan otonomi daerah Indonesia. Ini berarti penilaian transfer dana alokasi umum yang lebih besar serta kurangnya keterampilan daerah pada memaksimalkan potensi pemerintahan daerahnya, tetapi diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah secara konsisten meminta transfer dimana cukup besar melalui pemerintah federal serta tidak memanfaatkan potensi fiskal daerah secara maksimal. Ketika pemerintah menanggapi peningkatan pengeluaran melalui pemakaian dana transfer (hibah) yang diproyeksikan DAU dibanding perkiraan sumber dayanya sendiri akan PAD, maka terjadilah ketergantungan. (Fintari, 2020).

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran dimana didapatkan Badan Pusat Statistika Provinsi NTT secara keseluruhan pendapatan asli daerah kabupaten Lembata 2018 berjumlah Rp. 42.882.808 serta 2019 mengalami peningkatan berjumlah Rp. 74.178.779, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 44.251.242. Selama tiga tahun penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh daerah belum konsisten setiap tahunnya. Jika ditinjau dari data realisasi anggaran tersebut maka bisa dilihat bahwa naiknya pendapatan asli daerah setelah itu dana saldo diterima, yang juga naik tahun. Bisa dinyatakan jika pengelolaan keuangan daerah masih dibawah standar, dapat memiliki konsekuensi logis perlu diterima perda, yakni penilaian tatanan kerja keuangan daerah yang buruk (Saputri, 2020).

Salah satu indikator kelayakan suatu daerah untuk otonomi daerah adalah kinerja keuangannya (Anggreni & Sri Artini, 2018). Sejauh mana kontribusi penghasilan asli daerah pada keberhasilan keuangan menunjukkan mandirinya keuangan suatu wilayah. Meskipun PAD yakni sumber kekayaan daerah dimana visa mempengaruhi kerja keuangan, seringkali ditemukan masih amat kecil dibandingkan dana imbangnya (Armaja et al., 2017).

Merujuk pada penelitian (Wiguna, 2015) Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota Sumsel Terkait DAU, PAD, serta Belanja Modal Pemerintah Perbedaan utama antara penelitian

sebelumnya yakni adanya penggantian dan penambahan sejumlah variabel independen, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah. Namun demikian, ada perbedaan tambahan di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada data laporan realisasi anggaran (LRA) yang digunakan yaitu tahun anggaran 2012-2021.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan yakni kontrak antar agen dan prinsipal yang seberapa besar wewenang dalam pengambilan putusan yang dimiliki agen (Ria & Yuli Prastyatini, 2021). Menurut (Wihastinelahi & Erawati, 2020) teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Kemudian dalam penelitian (B. I. Sari & Wati, 2021) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Berdasarkan hal tersebut agent wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah gambaran suatu hubungan antara kedua belah pihak dimana salah satunya berperan sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya berperan sebagai penerima yang bertugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan yang telah dilimpahkan.

Teori keagenan pada penelitian ini mengacu pada adanya hubungan timbal balik antara agen dan prinsipal. Dengan bergotong-royong untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran yang juga diambil dari masyarakat. Diperkirakan bahwa dengan mandirinya daerah signifikan serta kemampuan perda untuk mengendalikan belanja daerah secara efektif, kinerja keuangan daerah dapat menjadi yang terbaik (Achmad et al., 2017).

Teori Signal

Teori signal pada penelitian ini adalah teori dimana mengatakan jika pemerintah memberi sinyal pada masyarakat agar bisa melakukan program layanan publik untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat (Ria & Yuli Prastyatini, 2021). *Signaling theory* memberi penjelasan jika pemerintah menjadi pihak diamanatkan ingin mengeluarkan sinyal pada publik. Pemerintah dapat memberi isyarat menyiapkan serta menyediakan laporan keuangan dimana memiliki kualitas, serta yang serta mengembangkan sistem pengendali internal, diungkapkan sepenuhnya dan transparan (Anynda & Hermando, 2020).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan dimana didasarkan aturan daerah dan disesuaikan undang-undang, dimana asalnya melalui retribusi, pajak, dan pendapatan pemerintah daerah, serta dari penjualan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya (Erawati & Hurohman, 2017). PAD adalah sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (I. P. Sari, 2016). Besarnya

PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya (Erawati et al., 2021).

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain PAD yang sah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perluasan kegiatan ekonomi yang berkembang jumlah jasa serta barang didapatkan pada masyarakat dan taraf hidup warganya (Erawati & Rahmawati, 2016). Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Nurhayati & Hamzah, 2020).

Semakin tinggi ekonomi tumbuh mewakili potensi daerah, sehingga makin baik kinerja keuangan pemerintah (Kumpangpune et al., 2019). Rasio pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat rasio PDRB pada trend realisasi produk domestik regional bruto Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun selama 2012-2021.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dilaksanakannya desentralisasi, dana alokasi umum asalnya melalui APBN diberikan tujuannya agar terdistribusi kemampuan keuangan antar daerah dengan adil agar membiayai kebutuhan daerah agar kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat diperkecil (Wiguna, 2015). DAU dimana didapatkan melalui tiap pemda dari pemerintah federal bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah federal akan mengawasi distribusi uang untuk alokasi umum. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Wahyuni & Supheni, 2017).

Semakin ketat kendali pemerintah pusat, semakin besar pula uang alokasi umum, dan diprediksi dapat mengakibatkan pemda makin hati-hati pada menjalankan program kerja (Saraswati, 2017). Dana Alokasi Umum diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan bentuk pengukuran dari dana alokasi umum berupa jumlah rupiah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah penentu besar kecilnya suatu pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan menggunakan rasio utang terhadap modal (Ingga et al., 2017). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah dihitung menggunakan perbandingan antara

total utang daerah dan total aset daerah. Hal ini disebabkan kuantitas aset dan alokasi anggaran berbeda-beda di setiap daerah (Mulyani & Wibowo, 2017). Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang (I. P. Sari, 2016).

$$\text{UPD} = \frac{\text{Total Hutang Daerah}}{\text{Total Aset Daerah}}$$

Kinerja Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Kinerja keuangan daerah adalah salah satu tolak ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah (Erawati & Tarigan, 2019). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerahnya yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Putri & Darmayanti, 2019).

Pada penelitian ini digunakan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Kemandirian pembiayaan daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

METODE

Sekelompok orang yang dianggap menjadi perhatian dalam pengamatan yang termasuk dalam lingkup penelitian disebut sebagai populasi (Suranta et al., 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dijadikan sebagai populasi penelitian. Sampel yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran 2012-2021. Adapun teknik mengambil sampel penelitian ini memakai metode sensus yakni mengambil semua data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun anggaran 2012-2021 di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Cara pengumpulan data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Memperoleh data laporan realisasi anggaran dan neraca pemerintah kabupaten lembata tahun anggaran 2012-2021.
2. Data serta informasi dimana berhubungan dengan penelitian ini didapatkan melalui jurnal, web/situs resmi, ataupun internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dipakai sebagai uji normalitas dalam penelitian ini. Tabel berikut menampilkan hasil pengujian:

Tabel 1. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	93,37897779
Most Extreme Differences	Absolute	,141
	Positive	,141
	Negative	-,107
Test Statistic		,141
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data sekunder,2023, diolah.

Tabel 1 menunjukkan jika nilai Asymp-sig (2-tailed) adalah 0,200 , sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dengan menguji nilai toleransi dan VIF, pengujian ini menentukan apakah model regresi berganda menunjukkan multikolinieritas (Variance Inflation Factor).

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-335,896	263,803		-1,273	,259		
	PAD	,570	,101	1,164	5,634	,002	,568	1,760
	PE	-,482	,263	-,345	-1,837	,126	,688	1,453
	DAU	,383	,095	,866	4,020	,010	,522	1,914
	UPD	-,039	,047	-,153	-,820	,449	,692	1,444

a. Dependent Variable: KKD

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil perhitungan menghasilkan nilai dibawah angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, uji Glejser dipakai dalam menilai heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat dalam gambar berikut:

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55,252	82,906		,666	,535
	PAD	-,022	,032	-,272	-,700	,515
	PE	,201	,083	,860	2,435	,059
	DAU	-,027	,030	-,372	-,918	,401
	UPD	,003	,015	,078	,222	,833

a. Dependent Variable: Abs_RES

Tabel 3 di atas menyatakan jika teknik uji Glejser digunakan untuk menghasilkan temuan hasil uji heteroskedastisitas. Karena tiap variabel independen punya nilai sig lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson dipakai dalam uji autokorelasi penelitian ini. Tabel berikut menampilkan temuan tes:

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,937 ^a	,879	,782	125,281	1,620

a. Predictors: (Constant), UPD, PAD, PE, DAU

b. Dependent Variable: KKD

Gambar 4 hasil output uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,620 berada diantara -2 dan 2, maka dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Linear Berganda

Tabel 5. Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-335,896	263,803		-1,273	,259		
	PAD	,570	,101	1,164	5,634	,002	,568	1,760
	PE	-,482	,263	-,345	-1,837	,126	,688	1,453
	DAU	,383	,095	,866	4,020	,010	,522	1,914
	UPD	-,039	,047	-,153	-,820	,449	,692	1,444

a. Dependent Variable: KKD

Persamaan Regresi $Y = -335,896 + 0,570 \text{ PAD} - 0,482 \text{ PE} + 0,383 \text{ DAU} - 0,039 \text{ UPD}$, menggambarkan bahwa variabel bebas (independent) Pendapatan asli daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (KKD).

Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-335,896	263,803		-1,273	,259		
	PAD	,570	,101	1,164	5,634	,002	,568	1,760
	PE	-,482	,263	-,345	-1,837	,126	,688	1,453
	DAU	,383	,095	,866	4,020	,010	,522	1,914
	UPD	-,039	,047	-,153	-,820	,449	,692	1,444

a. Dependent Variable: KKD

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan:

1. Hasil Uji t menyatakan jika nilai signifikansi memiliki pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah yakni $0,002 < 0,05$ serta nilai t hitung $5,634 > 2,570$ sehingga H1 didukung. Variabel pendapatan asli daerah bisa dikatakan begitu mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Lembata 2012-2021.
2. Hasil Uji t menunjukkan jika nilai signifikan pengaruh Pertumbuhan ekonomi pada variabel kinerja keuangan daerah yakni $0,126 > 0,05$ serta nilai t hitung $-1,837 < 2,570$, sehingga H2 tidak didukung. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika faktor pembangunan ekonomi tidak berpengaruh kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata tahun 2012-2021.
3. Hasil uji t menyatakan pengaruh DAU pada faktor kinerja keuangan daerah mempunyai nilai signifikannya yakni $0,010 < 0,05$ serta nilai t hitung $4,020 > 2,570$ hingga H3 didukung. Sehingga bisa diambil kesimpulan jika variabel DAU mempunyai pengaruh pada kerja keuangan daerah di Kabupaten Lembata tahun 2012-2021.
4. Hasil uji t menyatakan jika nilai signifikansi pengaruh Ukuran perdat terhadap variabel kerja keuangan daerah yakni $0,449 > 0,05$ serta nilai t hitung $-0,153 < 2,570$ sehingga H4 tidak mendukung. Sehingga bisa diambil kesimpulan jika variabel ukuran pemda tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata tahun 2012-2021.

Uji F

Tabel 7. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	568977,699	4	142244,425	9,063	,016 ^b
	Residual	78476,701	5	15695,340		
	Total	647454,400	9			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), UPD, PAD, PE, DAU

Melalui hasil pengujian dimana dilakukan gambar 7 dipahami jika nilai signifikansi untuk pengaruh variabel PAD, variabel Pertumbuhan Ekonomi, variabel dana alokasi umum, serta variabel Ukuran pemda dengan cara simultan terhadap variabel Kinerja keuangan daerah yakni berjumlah $0,016 < 0,05$ serta nilai F hitung $9,063 > 4,53$ sehingga model tersebut sudah tepat (goodness of fit). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh PAD, PE, DAU, dan UPD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (KKD).

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,937 ^a	,879	,782	125,281	1,620	

a. Predictors: (Constant), UPD, PAD, PE, DAU

b. Dependent Variable: KKD

Gambar 8 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi R² yang dihasilkan pada model 1 sebesar 0,937 atau 93,7%. Artinya Pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi (PE), dana alokasi umum (DAU), dan ukuran pemerintah daerah (UPD) dapat menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Daerah (KKD) sebesar 93,7%.

Pembahasan

Pengaruh PAD pada Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata.

Melalui temuan penelitian, H1 terdukung karena variabel PAD memiliki nilai signifikan (0,002) lebih kecil akan 0,05 serta t hitung (5,634) lebih besar akan t tabel (2,570). Menurut temuan penelitian, PAD mempunyai dampak signifikan serta positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya, PAD bisa membantu mengembangkan kinerja keuangan perda. Kinerja Keuangan Daerah akan naik setelah setiap kenaikan PAD, begitupun kebalikannya.

Adapun hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nasution & Panggabean, 2017), (Suranta et al., 2018), (Wahyuni & Supheni, 2017) dan (Saraswati & Rioni, 2019) menyatakan jika pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan serta positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemudian di pertegas kembali

oleh (Anggreni & Sri Artini, 2018) dimana mengatakan jika peningkatan penghasilan asli daerah dapat berakibat meningkatnya tatanan kerja keuangan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 tidak terdukung karena pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,126 sebesar 0,05 serta t hitung (-1,837) lebih besar dari t tabel (2,570). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi di daerah belum bisa secara maksimal menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana daerah juga belum mendukung peningkatan investasi dan produktifitas masyarakat sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju (Priyono et al., 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Patricia, 2021) dimana mengklaim jika kinerja keuangan daerah tidak terpengaruh pembangunan ekonomi. Namun temuan penelitian bertentangan akan penelitian sebelumnya oleh (Nasution & Panggabean, 2017), (Nurhayati & Hamzah, 2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial pada kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata.

Hasil penelitian menyatakan jika DAU memiliki nilai signifikansi yaitu (0,010) lebih kecil 0,05 serta t hitung (4,020) lebih besar t tabel (2,570), mendukung H3. Temuan penelitian ini dinyatakan jika kinerja keuangan daerah terpengaruh dana alokasi umum. Secara khusus, anggaran alokasi umum akan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah yang ditandai dengan peningkatan pada pembangunan di Kabupaten Lembata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Wiguna, 2015), (Wahyuni & Supheni, 2017) dan (Fintari, 2020) dimana mengatakan jika DAU mempunyai dampak pada kinerja keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Machmud & Radjak, 2018) yang menyatakan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata.

Hasil penelitian menyatakan H4 tidak didukung karena variabel ukuran pemda memiliki nilai signifikan (0,449) lebih dari 0,05 dan t hitung (-0,153) lebih kecil dari t tabel (2,570). Temuan penelitian ini menunjukkan jika ukuran pemerintah daerah tidak punya dampak pada kinerja keuangan daerah. Hal ini karena peranan total aset tak berhasil meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wafa, 2018) dan (Rahma Putri & Amanah, 2020) dimana mengatakan jika ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan bukan hanya aset yang besar, namun manajemen pemerintah daerah juga harus bisa memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki tersebut supaya dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Hamdayani & Bachtiar, 2021).

SIMPULAN

Melalui hasil uraian pembahasan serta analisis data maka diperoleh kesimpulan penelitian yakni : Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata dipengaruhi oleh PAD. Ini disebabkan PAD berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan kemandirian suatu daerah sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanatnya, mendorong pertumbuhan daerah, dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Kinerja keuangan suatu daerah tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi kawasan untuk secara efektif menarik investor untuk membuka usaha di sana. Meskipun PAD yang tinggi menunjukkan keuangan daerah canggih, infrastruktur dan fasilitas daerah belum memberi dukungan perluasan investasi dan produksi penduduk, hingga belum bisa mendongkrak PAD melalui sektor ini. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata. Ini disebabkan peningkatan pada DAU sejalan meningkatnya tatanan kinerja keuangan daerah yang ditandai dengan peningkatan pada pembangunan di Kabupaten Lembata. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pemerintahan daerah. Ini dikarenakan total aset tak mampu membantu pemerintah daerah meningkatkan kinerja keuangannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DAU, serta Ukuran Pemerintah pada Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, maka saran yang bisa peneliti berikan agar peneliti kedepannya agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan dimasa mendatang dengan menyarankan menambah atau menggunakan variabel lain seperti Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Otonomi Fiskal, Dana Bagi Hasil, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.

REFERENSI

- Achmad, A., Septiyanti, R., & Metalia, M. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–14.
- Anggreni, N. K. A., & Sri Artini, L. G. (2018). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(3), 1315. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i03.p06>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Anynda, N. S., & Hermando, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Ekonomi Akuntansi, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Akuntansi Dewantara*, 1(2 SE-Artikel), 127–137. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1519>
- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41–56. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.126>
- Erawati, T., & Tarigan, M. S. B. (2019). Pengaruh Peran Internal Audit , Pemahaman Tentang PP NO 71 TAHUN 2010 , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 3(1), 59–66. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3336>
- Ermawati, Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran (Size) Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13359>
- Fintari, S. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 59–68. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.2>
- Hamdayani, & Bachtiar, Y. (2021). Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 269–275.
- Ingga, I., Yasin, M., & Riyadi, S. (2017). Analisa Pengaruh Struktur APBD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493–510.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpek.24818.20.2.2019>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1–19. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/122>
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap

- Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rahma Putri, R. A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- RIA, M. C., & Yuli Prastyatini, S. L. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Tax Planing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6330>
- Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *Riset Dan Akuntansi*, 1999(23), 452–459.
- Saraswati, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 44–55. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *Journal Of Management*, 3(1), 679–692.
- Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Otonomi Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemeruntah Daerah: Studi pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 144–154. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671>
- Wafa, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional IENACO-2016*, 117.
- Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1.
- Wiguna, K. Y. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Fordema*, 12(1), 1–50.
- Wihastinelahi, W., & Erawati, T. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Kulon Progo(Studi Kasus di Kecamatan Panjatan). *Journal Competency of Business*, 4(2), 77–94. <https://doi.org/10.47200/jcob.v4i2.702>